

IMPLEMENTASI LAYANAN
SISTEM INFORMASI USULAN LELANG (SIUL)
DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
KOTA SURABAYA

Vivi Nur Vitasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: vita.vivinurvita@gmail.com

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: efanida@yahoo.com

Abstrak

Pelayanan Publik yang diberikan oleh pemerintah salah satunya Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) yang merupakan inovasi yang diluncurkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya, yang bertujuan untuk memangkas alur pengurusan usulan lelang barang/jasa. Berdasarkan SK Walikota Nomor: 188.45/296/436.1.2/2018 SIUL dapat memberikan kemudahan bagi OPD dalam penurusan lelang berbasis *website* yang terintegrasi dengan GRMS (SPSE) untuk mengusulkan dokumen usulan lelang secara aman, tertib, tercatat dan termonitoring. Secara resmi diterapkan pada tanggal 14 Februari 2018, merupakan inovasi layanan usulan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, adanya kekurangan dalam implementasinya sehari-hari. Masih terdapat staff yang kurang paham pada penggunaan aplikasi ini, maka timbul beberapa masalah yang muncul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana teknik analisis data yang digunakan antara lain adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Aplikasi SIUL berbasis *website* Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. Dengan adanya hasil analisa terhadap SIUL, maka dapat ditemukan beberapa solusi yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hasil dari penelitian terkait SIUL menunjukkan implementasi pelayanan publik tersebut mendapatkan respon yang baik oleh PPK, dengan adanya infrastruktur yang memadai dengan baik dari segi Hardware dan Software akan membuat pelayanan SIUL berjalan dengan optimal. walaupun masih terdapat kekurangan di bidang pelayanannya, tidak sinkron data antara SIUL dengan LPSE serta jaringan yang terganggu jika terkena petir. Selain itu masih terdapat beberapa OPD yang belum memiliki scanner. Namun pihak UKPBJ berupaya untuk meningkatkan pelayanannya baik di bidang pelayanan maupun dibidang koneksi jaringan internet.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Publik

Abstract

Public Services provided by the government one Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) which is an innovation launched by the Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ) in Surabaya, which aims to cut the flow of the maintenance of the proposed auction of goods / services. Based Mayors Number: 188.45 / 296 / 436.1.2 / 2018 SIUL to provide convenience to the WTO in penurusan auction based websites are integrated with GRMS (SPSE) to propose the auction proposal document safe, orderly, and termonitoring recorded. Formally adopted on 14 February 2018, is the first proposal of service innovation and the only one in Indonesia. Based on research conducted by researchers, the deficiency in the day to day implementation. Still there are staff who do not understand the use of this application, then it raises some issues that arise. This research use descriptive research with qualitative approach whereby data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, conclusion and verification of data. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of web-based applications SIUL At Work Unit Procurement of Goods / Services (UKPBJ) in Surabaya. With the results of the analysis of the whistle, it can be found a few solutions

that will be able to resolve the problem The results of the SIUL-related research show that the implementation of public services received a good response by PPK, with the existence of adequate infrastructure in terms of both Hardware and Software that would make the SIUL service run optimally, although there are still shortcomings in the field of service, there is no synchronous data between SIUL and LPSE and the network is disturbed if it is struck by lightning. In addition there are still several OPDs that do not have a scanner. However, the UKPBJ seeks to improve its services both in the field of service and in the field of internet network connections.

Keywords: Implementation, Services, Public

PENDAHULUAN

Setiap manusia membutuhkan pelayanan dalam kehidupannya. Masyarakat akan selalu menuntut pelayanan publik yang prima dari birokrat. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, baik terhadap masyarakatnya maupun stakeholders guna memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kotler & Keller (2016:422) Pelaksanaan pelayanan publik dari negara dipertegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk memberikan pelayanan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yaitu pelayanan terhadap pengadaan barang dan jasa. Tersedianya barang dan jasa di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah ataupun birokrat dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan diperlukan suatu organisasi khusus yang berfungsi untuk melayani dan menangani proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, telah mengatur dan menetapkan organisasi yang khusus menangani proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bentuk Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ).

Salah satu daerah yang telah menetapkan organisasi khusus menangani proses pengadaan

barang dan jasa pemerintah dalam bentuk Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) adalah Kota Surabaya. Sejalan dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/296/436.1.2/2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya dituntut untuk mewujudkan pengelolaan pengadaan barang/jasa (khususnya di Kota Surabaya).

Salah satu instansi publik yang melakukan inovasi dalam pelayanannya yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. Inovasi yang diluncurkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya adalah Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL). Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) merupakan Sistem Informasi Layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibuat dan dikembangkan oleh UKPBJ Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah/Inststitusi Lainnya dalam hal Usulan lelang berbasis web yang terintegrasi dengan GRMS (SPSE). Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat kemudahan untuk mengusulkan dokumen usulan lelang secara aman, tertib, tercatat, dan termonitoring. SIUL mulai diimplementasikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya sejak 14 Februari 2018 merupakan inovasi pelayanan pengadaan barang & jasa pertama dan satu-satunya di Surabaya bahkan merupakan penggagas inovasi pertama usulan lelang di Indonesia.

Layanan usulan lelang secara online terdapat 2 (dua) jenis yaitu usulan pekerjaan kontruksi dan usulan konsultasi, barang & jasa lainnya. Usulan pekerjaan kontruksi memiliki batasan waktu dokumen usulan lelang adalah H-10 kerja sebelum tanggal pengumuman lelang. Sedangkan untuk pekerjaan Jasa konsultansi, barang dan Jasa Lainnya adalah H-7 kerja sebelum tanggal pengumuman lelang. Pelaksanaan lelang/seleksi setiap bulannya terdapat 3x Periode.

Dengan berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana implementasi layanan usulan lelang yang telah dilakukan oleh pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya dengan judul **“Implementasi Layanan Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya.”**

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan data deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah gambaran secara lengkap mengenai Implementasi Layanan Sistem Informasi Usulan lelang (SIUL) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya dengan berdasarkan Kriteria Implementasi Electronic-Government menurut Rianto dan Lestari. Kriteria tersebut melihat implementasi berdasarkan 7 komponen yang terdiri dari *Hardware* (Perangkat Keras), *Software* (Perangkat Lunak), *Human Resources* (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi dan Sikap Pelaksana. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa warga dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) akan efisiensi serta efektifitas pengusulan paket lelang. Upaya pemenuhan kebutuhan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) tersebut diwujudkan dengan bantuan teknologi yang saat ini sangat memudahkan jika digunakan dalam aspek apapun. Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dilakukan dalam pelayanan usulan lelang yang diimplementasikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya bernama Sistem Informasi Usulan

Lelang (SIUL). Pelayanan usulan lelang berbasis *website* tersebut menjadi salah satu inovasi yang diunggulkan dalam mewujudkan Kota Surabaya menuju Smart City.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIUL merupakan pelayanan kepada PPK dibidang pengusulan paket lelang baik berupa barang ataupun jasa. Dalam implementasi layanan E-Government ini agar mendapat hasil yang sesuai dengan harapan semua pihak maka harus melihat aspek-aspek dalam implementasi E-Government untuk mewujudkan pelayanan yang baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43).

a. *Hardware* atau Perangkat Keras

Hardware (Perangkat Keras) merupakan salah satu aspek utama dalam mewujudkan E-Government di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya karena pada dasarnya penerapan teknologi informasi tidak bisa lepas dengan kebutuhan *hardware* ini. *Hardware* sendiri berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

McLeod (2007:113) menjelaskan konsep sumber daya *hardware* meliputi seluruh peralatan serta bahan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Secara khusus sumber daya ini meliputi tidak hanya mesin (komputer dan perlengkapan lainnya) tetapi juga semua data yaitu objek berwujud tempat data dicatat dari lembaran kertas hingga disk magnetis atau optikal. Sejalan dengan pendapat tersebut perangkat keras yang disediakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya ada 4 unit komputer yang memiliki spesifikasi tinggi dinilai cukup memadai dalam pengoprasian aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) yang terhubung dengan jaringan global (internet).

Perangkat Keras yang digunakan juga menggunakan sarana dan prasarana yang masih ada. Sehingga tidak membutuhkan anggaran dana untuk perangkat keras (*Hardware*) untuk pengimplementasian aplikasi SIUL karena menggunakan komputer yang telah ada berasal dari Sub Unit Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa.

b. *Software* atau Perangkat Lunak

Sumber daya E-Government lainnya yang cukup penting adalah perangkat lunak (*software*). Software yang digunakan aplikasi

Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) berbasis *website*. Dalam pembuatan *software* aplikasi ini yang terlibat yaitu staf Sub Unit Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya bekerjasama dengan Dinkominfo Kota Surabaya untuk menciptakan jaringan internet. *Software* yang digunakan untuk *database* yaitu menggunakan *phpMyAdmin*, sedangkan untuk programnya aplikasi SIUL sendiri menggunakan PHP 5.6.

Software untuk aplikasi SIUL telah dibuat dengan baik, namun masih diperlukan adanya perbaikan dalam aplikasi tersebut mengingat pada awal peluncuran yang mana data antara SIUL dan LPSE tidak sinkron. Sehingga dilakukannya pembaharuan dan lancar. Upaya pemeliharaan, perawatan dan pembaharuan selalu diperhatikan oleh admin maupun teknisi IT. *Maintenance* dilakukan setiap hari pada jam tutup pelayanan agar jika terkena *hacker* masih memiliki cadangan data. *Maintenance* yang dilakukan meliputi pengecekan *firewall*, mengecek keamanan data pengguna agar data pengguna terjaga dengan cara mengecek *database server* yang dimiliki, pengecekan jaringan agar layanan tetap terjaga dengan stabil.

Sumber dana yang digunakan untuk ketersediaan *software* (perangkat lunak) dalam aplikasi ini tidak ada. *Software* yang berperan dalam pembuatan adalah *programmer* Sub Unit Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

c. *Human Resources* atau Sumber Daya Manusia

Human Resources (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas ataupun kegiatannya (Rianto dan Lestari 2012:45). Sejalan dengan pendapat Hasibuan (2003:3) yang mendefinisikan sumber daya manusia adalah seluruh manusia yang terlibat didalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. *Human Resources* (SDM) dalam hal ini adalah para pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya yang melakukan aktivitas dalam organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi.

Rianto dan Lestari (2012:45) menjelaskan kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) telah dipenuhi oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya, tetapi untuk menyiapkan SDM yang *aware* (peduli) terhadap perubahan merupakan pekerjaan besar. Untuk itu, SDM yang terlibat dipilih langsung oleh Walikota Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/296/436.1.2/2018 merupakan orang-orang yang dianggap mampu dan mewakili komitmen aparat dan tanggung jawab aparatur atas layanan aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) kepada seluruh OPD yang ada di Kota Surabaya. Tentunya SDM yang dipilih telah sesuai dengan SOP pelaksanaan program dan yang paham soal IT serta dipilih berdasarkan kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL). SDM yang disediakan pengelola aplikasi SIUL merupakan orang-orang yang terpilih dan memenuhi kriteria serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional. SDM yang berkualitas dapat menjamin suatu pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan. SDM yang ada untuk pelaksana aplikasi SIUL dinilai sudah cukup baik dan SDM yang ada telah berkompeten untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis online di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya.

Gomes (2003:199) mengungkapkan bahwa pelatihan sering dipakai sebagai solusi atas persoalan kinerja organisasi. Untuk admin yang menjalankan program aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) sejak dulu telah diberikan dan dibekali pelatihan berbasis IT untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL). Untuk bagian pelaksana aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) adalah pegawai pada Sub Unit Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggung jawab dan memiliki salah satu tugas pokok yaitu mengoperasikan pelaksanaan usulan lelang berbasis online.

d. Data dan Informasi

Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi. Sumber daya ini sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh implementor *Electronic Government*. Padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (*database*) menjadi bahan utama proses *Electronic Government* guna mendukung tujuan penyebarluasan informasi (Rianto dan Lestari 2012:46). Dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) data dan informasi merupakan sumber daya yang cukup mendapat perhatian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. Data yang dimiliki oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya yaitu adanya digitalisasi dokumen, dokumen yang dimaksud adalah dokumen usulan lelang dari OPD Kota Surabaya yang berupa soft file.

McLeod (2007:113) membedakan antara data dengan informasi, data terdiri atas fakta-fakta dan angka-angka yang relative tidak berarti bagi pemakai, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau data telah memiliki arti. Dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) komponen sumber daya data berbentuk lembaran dan informasi diberikan dalam bentuk digital. Data berbentuk lembaran yang dimiliki meliputi print out usulan paket lelang yang masuk. Sedangkan informasi yang dibagikan berupa data informasi mengenai status usulan paket lelang beserta perkembangannya. Data tersebut tersimpan dan dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL). Selain itu, terdapat juga informasi mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga dapat memonitoring agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara.

Data dan informasi yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) meliputi data total paket lelang, detail lelang dan status usulan lelang tersebut. Setiap mengusulkan lelang pasti mendapatkan kode lelang, dan tidak akan sama dengan paket usulan lelang yang lain. Status paket usulan lelang diberikan sesuai tahapannya dimana usulan lelang yang masuk akan berstatus usulan yang berarti memuat dokumen paket usulan lelang, tahap kedua adalah revisi usulan

yang berarti bahwa pihak Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) yang telah upload dokumen lelang mengalami revisi karena terdapat dokumen yang salah atau kurang lengkap, setelah dilakukannya revisi usulan pihak Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) menunggu konfirmasi dari admin Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Tahap ketiga adalah berstatus rakor yang berarti rapat koordinasi, yang dilakukan di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. Jika pada saat rakor terjadi perubahan dokumen, status paket menjadi Revisi Rakor. Tahap terakhir adalah launching. Paket usulan lelang yang sudah benar dan lengkap selanjutnya akan di launching di portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dalam penyebaran informasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya hanya kepada pemilik user. Sehingga data dan informasi pada aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) tidak dapat dilihat oleh Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) lain, sehingga data dan informasi yang diberikan sesuai dengan user admin tiap Pejabat Pembuat Keputusan (PPK).

e. Struktur Organisasi

Dari berbagai referensi menyatakan bahwa idealnya implementor *Electronic Government* adalah lembaga struktural yang berada satu tingkat di bawah top leader. Hal ini sejalan dengan dengan kondisi yang ada di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. Dalam implementasi layanan aplikasi SIUL ini dilaksanakan oleh Sub Unit Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa tepat dibawah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang sebagai implementor *Electronic Government*.

Menurut Indrajid (2002) mengatakan bahwa faktor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin dari penyelenggaraan program, dimana memiliki tanggungjawab melaksanakan program dari awal hingga akhir sesuai yang dijalankan. Sejalan dengan pernyataan tersebut peran ketua/pemimpin yang handal sangat dibutuhkan agar dapat memberikan progress dalam implementasi

sistem kedepannya. Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Surabaya (UKPBJ) Kota Surabaya bertanggungjawab atas terlaksananya layanan usulan berbasis online yaitu Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL).

Lee (2009:21) berpendapat perubahan struktur organisasi harus direncanakan dengan matang dan diimplementasikan dengan sistematis. Struktur organisasi yang berubah sejak 2018, perubahan terletak pada tata letak Sub Unit Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa. Sebelumnya dibawah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdapat Sekretariat, setelah itu Sub Unit Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa. Dan sekarang dirubah posisi kedudukan Sub Unit Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa menjadi satu tingkat dibawah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya.

Menurut Jan-Erik Lanedan Svante Ersson (dalam Miriam Budiardjo, 2009:97) dapat dikatakan suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Sejalan dengan pernyataan tersebut, struktur organisasi UKPBJ Kota Surabaya telah dibentuk Walikota Surabaya melalui Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/296/436.1.2/2018 yang telah sesuai dengan SOP pelaksanaan program dan yang paham soal IT. Berdasarkan tabel 4.4 dan berdasarkan penjelasan akan tupoksi masing-masing Sub bagian hal tersebut menunjukkan struktur organisasi yang dimiliki untuk mengimplementasikan layanan SIUL dapat dinilai sangat memadai dalam mengerjakan tupoksinya. Mulai dari pimpinan hingga admin aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) telah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Setiap individu memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan layanan SIUL, serta dapat dinilai mampu dalam mengerjakan tupoksi pekerjaannya

f. Komunikasi

Pemerintah pusat dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya selaku pelaksana program Sistem

Informasi Usulan Lelang (SIUL) harus memiliki persepsi yang sama tentang program yang dilaksanakan. Sosialisasi yang dilakukan atau diadakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya pada Sub Unit Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yaitu memberikan pelatihan khusus kepada dengan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) di tiap-tiap OPD di Kota Surabaya, Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) ini dibekali ilmu dalam menggunakan aplikasi SIUL untuk memudahkan dalam pengurusan paket lelang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi yang digunakan sudah cukup memadai dan komunikasi yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) di tiap-tiap OPD di Kota Surabaya terkait dalam menanggapi pengaduan atau keluhan oleh Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) di tiap-tiap OPD di Kota Surabaya kepada Sub Unit Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa. Pada implementasinya masih terdapat PPK yang belum paham betul terkait penurusan paket lelang berbasis website.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:140) berpendapat semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Komunikasi yang terjadi antara Pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya dengan pihak PPK sangatlah baik. Hal ini tercermin dari komunikasi yang terlibat antara keduanya tidak berhenti setelah adanya sosialisasi dan pelatihan pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) melainkan juga terjadi sesudahnya.

g. Sikap Pelaksana

Dukungan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya sangat mempengaruhi keberhasilan program terutama kewenangannya untuk menentukan jenis kegiatan maupun sasaran kegiatan. Dengan aplikasi SIUL maka Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya ikut serta memonitoring Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga dapat mengefisiensi anggaran negara dan tidak

menimbulkan kerugian negara. Tidak hanya itu jika Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sangat rendah dapat mengakibatkan gagal lelang. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya bertindak sebagai tim koordinasi, mendistribusikan tugas dan wewenangannya kepada anggota tim kelompok kerja di bawahnya seluruh aparat pelaksana tidak hanya dituntut untuk menerima adanya aplikasi SIUL, namun lebih dari itu mereka dituntut untuk berkomitmen dalam pelaksanaannya dan mewujudkan tujuan serta target-taergetnya.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:140) mengungkapkan hal yang senada yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Agar program ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan motivasi, motivasi dalam pemberian layanan aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) ini diberikan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya selaku pimpinan tertinggi dalam instansi.

Manullang (2002:113) berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan yang diberikan daya perangsang kepada pegawai bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja dengan segala daya dan upaya. Bentuk motivasi yang diberikan Kepala UKPBJ kepada pegawainya adalah dengan memberikan arahan dan mengingatkan jajaran pelaksana pemberian layanan usulan lelang untuk bekerja secara baik dalam memberikan pelayanan secara tanggap dan cepat. Sikap pelaksana yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya telah direspon baik oleh admin pengguna aplikasi SIUL, karena tim pengelola aplikasi telah merespon dengan cepat dan tanggap adanya keluhan dari admin dari pihak Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) di tiap-tiap OPD di Kota Surabaya sebagai pengguna aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL). Pengguna aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) dapat merasakan bentuk respon baik yang diberikan pelaksana. Kecepatan pemberian tanggapan menjadi tolak ukur tingkat kepuasan pihak PPK. PPK merasa puas dengan sikap yang ditunjukkan pelaksana

yang cukup optimal dan professional. Kecepatan pemberian tanggapan menjadi tolak ukur tingkat kepuasan pihak PPK. PPK merasa puas dengan sikap yang ditunjukkan pelaksana yang cukup optimal dan professional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil dan pembahasan mengenai layanan Sistem Informasi Usulan (SIUL) yang ada, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Layanan Sistem Informasi Usulan (SIUL) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya dapat di katakan sudah berjalan dengan baik Hal ini berdasarkan dari hasil analisis menggunakan 7 indikator aspek-aspek dalam implementasi E-Government untuk mewujudkan pelayanan yang baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43). Aspek pertama yaitu hardware (yang disediakan 4 unit komputer admin yang lengkap dengan server. Namun, ditemukan masalah yaitu tidak sinkron data antara SIUL dengan LPSE. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya server antara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya dengan Dinkominfo Kota Surabaya. Software yang digunakan untuk aplikasi M-Bonk yaitu aplikasi berbasis *website*. *Software* yang digunakan untuk *database* yaitu menggunakan *phpMyAdmin*, sedangkan untuk programnya aplikasi SIUL sendiri menggunakan PHP 5.6. Yang terlibat dalam pembuatan software aplikasi ini yaitu programmer Sub Unit Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa. Maintenance dilakukan setiap hari pada jam tutup pelayanan untuk menjaga sistem aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) agar aman dan terhindar dari hacker. Human Resources (SDM), SDM yang terlibat dalam program Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) ini merupakan orang-orang pilihan yang langsung ditunjuk melalui SK Walikota Surabaya, hal ersebut dibuktikan dengan SDM lulusan TI. Dalam implementasi layanan Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) komponen sumber daya data dan informasi berbentuk kertas/lembaran dan bentuk digital. struktur organisasi, Implementor program Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) berada pada satu ingkat dibawah top leader. Struktur organisasi yang ada sesuai antara implementasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) dengan tugas pokok dan fungsinya. Komunikasi yang dijalin melalui Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan atau

diadakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya pada Sub Unit Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yaitu memberikan pelatihan khusus kepada dengan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) di tiap-tiap OPD di Kota Surabaya. Meskipun banyak PPK yang masih awam terkait aplikasi Sistem Informasi Usulan Lelang (SIUL) Implementasi layanan pengusulan paket lelang secara online (SIUL) direspon dengan baik oleh pelaksana.

Saran

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan penelitian yang ada, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

- 1 Mengembangkan dan lebih memperketat pada sistem pemeliharaan keamanan/*security* dari aplikasi.
- 2 Lebih memperhatikan dalam perawatan *software* yaitu yang berkaitan pada pembaruan sistem, agar tidak mudah di retas dan jaringan tetap stabil.
- 3 Melakukan sosialisasi kaitannya dengan pelaksanaan usulan paket lelang agar informasi dapat menyeluruh dan tersampaikan kepada PPK yang masih kebingungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP., selaku dosen pembimbing skripsi.
- b. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., dan Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji skripsi.
- c. M. Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP. selaku dosen pembimbing jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Cardoso Gomes. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset

Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi Offset. Yogyakarta

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, (2016): *Marketing Management*, 15th Edition New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc.

Lee, Nag Yeon. 2009. Modul 3 : *Penerapan e-Government*. United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development, Republic of Korea. Diakses melalui <http://www.unapict.org/academy>, pada 4 Januari 2019

Manullang, M., Manullang, Marihot AHM. 2001. *Manajemen Personalia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

McLeod, Raymond, Jr. George Schell. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2018. Jakarta

Rianto, Budi dan Tri Lestari. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/296/436.1.2/2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Surabaya. 2018. Surabaya